

## PEMBERDAYAAN KELOMPOK MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN TAMAMAUNG, KOTA MAKASSAR DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Andi Ainun Juniarsi Nur<sup>1</sup>, M Fadhil Nurdin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pascasarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Padjadjaran  
Andiainun012@gmail.com

Received : 21-06-2023 Revised : 30-05-2024 Accepted : 27-06-2024

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efek dan efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap pemberdayaan kelompok miskin di Kelurahan Tamamaung selama pandemi Covid-19. Program BST memberikan bantuan uang kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan nilai bantuan sebesar Rp. 600.000 per keluarga, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan bantuan sosial di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi dampak BST terhadap kehidupan dan pemberdayaan kelompok miskin di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar selama pandemi Covid-19. Metode ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis efektivitas BST. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BST memberikan bantuan uang kepada keluarga miskin di Kelurahan Tamamaung selama pandemi Covid-19. Meskipun bantuan ini membantu, beberapa penerima merasa jumlahnya kurang. Penggunaan dana BST bervariasi, dari kebutuhan konsumsi hingga modal usaha, namun masih ada tantangan dalam verifikasi data dan pencairan dana. Meskipun demikian, BST berpotensi mengurangi kerentanan dan ketidakberdayaan yang menjadi akar kemiskinan, tetapi diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Dari perspektif Robert Chambers, implementasi program BST dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan dan ketidakberdayaan yang menjadi faktor utama dalam jeratan kemiskinan. Program BST diharapkan dapat memberikan akses langsung kepada dana yang dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata Kunci: Bantuan Sosial Tunai, Pemberdayaan, Kelompok Miskin, Covid-19

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explore the effects and effectiveness of the Cash Social Assistance Program (BST) on the empowerment of the poor in Tamamaung Village during the Covid-19 pandemic. The BST program provides monetary assistance to poor families registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS), with an assistance value of Rp. 600,000 per family, and provides evaluation and recommendations for improving social assistance policies in the future. This research uses a qualitative descriptive approach to explore the impact of BST on the lives and empowerment of the poor in Tamamaung Village, Makassar City during the Covid-19 pandemic. This method uses in-depth interviews, observation, and documentation to analyze the effectiveness of BST. Data analysis was conducted by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of BST provided monetary assistance to poor families in Tamamaung Village during the Covid-19 pandemic. Although this assistance was helpful, some recipients felt the amount was insufficient. The use of BST funds varies, from consumption needs to business capital, but there are still challenges in data verification and fund disbursement. Nonetheless, BST has the potential to reduce the vulnerability and powerlessness at the root of poverty, but further efforts are needed to ensure its effectiveness. From Robert Chambers' perspective, the implementation of the BST program can be understood as an effort to reduce vulnerability and powerlessness, which are the main factors in poverty. The BST program is expected to provide direct access to funds that can help poor families meet their daily needs and improve their welfare.*

*Keywords: Cash Social Assistance, Empowerment, Poor Groups, Covid-19*

---

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran  
psrlyung@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia dilanda pandemi Covid-19, yang disebabkan oleh virus Corona, atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Kasus pertama kali dilaporkan di Wuhan, sebuah kota di China. Namun, kasus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dilaporkan bahwa Indonesia memiliki kasus COVID-19 pertama sebelum 2 maret 2020 (Ditjen P2P, 2021).

Pandemi COVID-19 memengaruhi sosial dan ekonomi selain kesehatan. Pada tingkat ekonomi, pandemi ini menyebabkan perekonomian domestik berhenti berjalan, yang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada tingkat -0,4 persen hingga 2,3 persen dalam jangka menengah. Ini adalah penurunan yang signifikan dari tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5%. Banyak sektor bisnis terjejas oleh wabah, menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja dan penurunan penyerapan tenaga kerja (TNP2K, 2021).

Selain kebijakan penanganan medis, pemerintah juga membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan PEN termasuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), program sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik (Kemenkeu, 2020).

Kelurahan Tamamaung, yang terletak di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, mengalami peningkatan jumlah keluarga miskin yang signifikan selama pandemi Covid-19. Dalam sudut pandang sosiologis, permasalahan ini mencakup berbagai aspek, seperti meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi, disintegrasi sosial, dan kerentanan sosial. Pandemi telah memperburuk kondisi ekonomi banyak keluarga yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi rentan, menyebabkan mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kesenjangan sosial semakin melebar, dan banyak keluarga menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan yang tepat waktu dan memadai.

Literatur menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Kelurahan Tamamaung meningkat tajam selama pandemi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kecamatan Panakkukang mengalami kenaikan sebesar 20% selama periode 2020-2021 (BPS Makassar, 2020). Selain itu, data dari Dinas Sosial Kota Makassar menunjukkan bahwa Kelurahan Tamamaung memiliki jumlah penerima BST yang paling tinggi dibandingkan kelurahan lain di kecamatan tersebut (Nur et al., 2021).

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Tamamaung mengungkapkan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin selama pandemi. Pertama, banyak rumah tangga mengalami kehilangan pendapatan karena pemutusan hubungan kerja atau penurunan aktivitas ekonomi. Kedua, akses terhadap bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan yang usang dan kurang akurat. Ketiga, ada masalah dalam distribusi bantuan, termasuk keterlambatan dan kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur penerimaan bantuan.

Salah satu tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar dan

perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Penulis memfokuskan penelitian mereka pada bantuan BST untuk masyarakat di luar Jabodetabek selama pandemi, yang bernilai Rp. 600.000 dan diberikan selama tiga bulan dan sebesar Rp. 300.000 untuk bulan berikutnya. Penerimaannya harus berasal dari keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau tidak memiliki Kartu Sembako atau Kartu Prakerja.

Bantuan telah didistribusikan di Kelurahan Tamamaung selama sembilan bulan, dan warga telah merasakan manfaatnya. Namun, data sasaran penerima bantuan sosial yang dimiliki oleh pusat dan daerah dapat tidak tepat sasaran karena kebanyakan data tersebut telah usang dan tidak relevan lagi dengan individu yang membutuhkannya. Mengingat bahwa COVID-19 memiliki dampak luas pada ekonomi, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan. Pemerintah membuat program bantuan selama pandemi COVID-19 untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan program bansos dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik tercapainya tujuan program untuk membantu masyarakat rentan yang terkena dampak COVID-19.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bantuan sosial, termasuk BST, memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat miskin selama krisis ekonomi. Studi oleh Rini (2021) mengungkapkan bahwa BST membantu penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama pandemi, meskipun ada tantangan dalam hal akurasi data penerima dan efektivitas distribusi bantuan. Penelitian oleh Syafitri (2020) menyoroti bahwa program bantuan sosial perlu disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar bantuan tersebut tidak hanya bersifat sementara tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan penerima. Sedangkan penelitian Susanto (2021) mengevaluasi program BST di Kabupaten Bandung selama pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BST berhasil membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima, masih terdapat masalah dalam pendataan yang mengakibatkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. Susanto merekomendasikan perbaikan sistem pendataan dan penyaluran bantuan untuk meningkatkan efektivitas program BST.

Nugroho (2021): Dalam penelitiannya, Nugroho mengeksplorasi bagaimana BST mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BST tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mengurangi stres sosial di masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, Nugroho juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih merata dan tepat sasaran. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini di kelurahan Tamamaung karena dua alasan utama: pertama, menurut data saat ini, kelurahan ini memiliki jumlah orang miskin dan rumah tangga yang paling banyak dari 11 kelurahan di kecamatan Panakkukang; kedua, kelurahan ini juga memiliki jumlah BST yang paling tinggi dari semua kelurahan di kecamatan Panakkukang.

Penelitian ini menawarkan beberapa *novelty* penting. Pertama, fokus pada Kelurahan Tamamaung sebagai studi kasus memberikan wawasan kontekstual spesifik yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kedua, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan eksplorasi mendalam tentang pengalaman

penerima BST selama pandemi, yang jarang dijelaskan secara detail dalam penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas BST dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mengkaji aspek pemberdayaan jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi dan sosial penerima bantuan. Keempat, penelitian ini memberikan analisis terperinci tentang masalah distribusi dan akurasi data penerima bantuan, yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga peneliti mengambil judul “Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar dalam Masa Pandemi Covid-19”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Bantuan BST mempengaruhi kehidupan dan pemberdayaan kelompok miskin di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang dampak BST terhadap kehidupan penerima bantuan. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tamamaung, dengan subjek penelitian berupa rumah tangga miskin yang menerima BST selama pandemi. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria penerima BST. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan penerima BST, aparat kelurahan, dan petugas penyalur bantuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka tentang dampak BST. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi kehidupan penerima BST, interaksi sosial, dan penggunaan bantuan, dengan tujuan memahami konteks dan perubahan yang terjadi pada penerima BST. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi serta memberikan konteks tambahan.

Instrumen penelitian terdiri dari panduan wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema dan subtema yang muncul dari wawancara dan observasi, kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pengalaman penerima BST. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi pola serta makna dari pengalaman partisipan. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji kredibilitas dilakukan dengan melibatkan peserta dalam proses verifikasi temuan untuk memastikan akurasi interpretasi data, sementara audit trail digunakan untuk mencatat semua langkah dan keputusan penelitian secara rinci agar transparansi dan keterlacakan terjaga.

Prosedur penelitian terdiri dari tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Tahap pengumpulan data melibatkan pelaksanaan wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen. Tahap analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengolah dan menganalisis data kualitatif. Akhirnya, tahap penyusunan artikel dilakukan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas BST dalam memberdayakan kelompok miskin di Kelurahan Tamamaung selama masa pandemi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk kebijakan bantuan sosial di masa mendatang.

## **KERANGKA TEORI/KONSEP**

Peneliti akan mencoba menggunakan apa yang disebut Robert Chambers (1983: 111) sebagai sarang kemiskinan atau jeratan kekurangan untuk menemukan inti dari kemiskinan. Ini adalah lingkaran kemiskinan yang terdiri dari lima ketidakberuntungan yang mengganggu orang miskin: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Menurut Chambers, dari kelima jeratan kekurangan ini, yang paling memerlukan perhatian adalah (1) kerentanan, dan (2) ketidakberdayaan. Ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, kenaikan BBM, krisis ekonomi, dan pandemi COVID-19 yang tiba-tiba menimpa mereka adalah salah satu contoh kerentanan. (subsistensi, menurut James Scott).

Kerentanan ini sering menimbulkan "roda penggerak kemiskinan", atau "roket kemiskinan", yang memaksa keluarga miskin untuk menjual harta benda mereka yang paling berharga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, menyebabkan keluarga itu semakin masuk ke dalam lembah kemiskinan. Karena eksploitasi ada di sini dalam segala bentuknya, ketidakberdayaan dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam mendorong proses kemiskinan atau pemiskinan. Namun, substansi dari ketidakberdayaan seringkali muncul dalam bentuk eksploitasi, yaitu pemerasan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat.

Menurut Robert Chambers (1983:149), ada tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan: lilitan kemiskinan, hilangnya hak, atau Kekayaan yang sulit dikembalikan mungkin disebabkan oleh tuntutan yang melampaui kapasitasnya; contohnya, pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya tetapi sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat.

Kemiskinan biasanya dikaitkan dengan lima kebutuhan: kewajiban adat; musibah; ketidakmampuan fisik, pengeluaran tidak produktif, dan pemerasan. Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam uraian di atas, penyebab kemiskinan terdiri dari faktor internal, yaitu kebutuhan yang segera harus dipenuhi tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Faktor eksternal, yaitu bencana alam, seperti krisis ekonomi saat ini, serta kurangnya pemihakan, yaitu kebijakan yang memberikan kesempatan dan pelayanan.

Teori marginalisasi dan ketergantungan adalah dua teori umum yang digunakan untuk menjelaskan akar kemiskinan. Ada banyak pendapat ahli tentang sebab-sebab kemiskinan. Dalam teori marginalisasi, kemiskinan dianggap sebagai akibat dari tidak memiliki semangat wiraswasta, apatis, fatalisme, tergantung, rendah diri, pemboros, dan konsumtif (Simbolon et al., 2023).

## **PEMBAHASAN**

### **Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Pemerintah Indonesia kembali melaksanakan Program Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2020 sebagai kompensasi subsidi COVID-19. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan didistribusikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Nilai BST adalah Rp. 600.000 per keluarga. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 59/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) menetapkan peraturan yang mengatur penyediaan BST.

Orang-orang yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung pandemi COVID-19 disebut penerima BST. Pemerintah menetapkan beberapa syarat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai ini. Di antaranya adalah:

1. Calon penerima terdiri dari anggota masyarakat yang terdaftar sebagai RT/RW dan tinggal di desa.
2. Calon penerima adalah individu yang mengalami kehilangan pendapatan selama pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja tidak dapat diterima oleh BLT dari Dana Desa.
4. Calon penerima yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos dari program lain tetapi belum terdaftar oleh RT/RW dapat langsung memberi tahu aparat desa.
5. Calon penerima yang memenuhi syarat tetapi tidak memiliki NIK dan KTP tetap dapat mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Namun, penerima harus menulis alamat lengkap dan tinggal di desa tersebut.
6. BLT akan diberikan secara tunai dan nontunai jika penerima sudah terdaftar dan sah. Transfer nontunai dilakukan ke rekening bank penerima, sedangkan tunai dapat diambil langsung di kantor pos terdekat atau melalui aparat desa atau bank milik negara.

BST didistribusikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). BST diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial atau belum.

### **Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)**

1. Verifikasi Data BST

Untuk memverifikasi data program BST, kami menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial. Di Kelurahan Tamamaung, penerima program BST adalah 352 rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdiri dari 3.340 rumah tangga miskin. Sementara itu, dari 370 rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia, rumah tangga penerima BST adalah 35,95% dari total rumah tangga penerima BST. Dari semua KPM yang menerima dana BST, data tahun 2010 digunakan. Data ini seharusnya tidak digunakan karena sangat tidak valid.

## 2. Pembagian Surat Pemberitahuan Pencairan BST

Kelurahan menerima surat pemberitahuan tentang pencairan dana BST dari Kantor Pos melalui TKS kelurahan. Lurah Tamamaung kemudian menyerahkannya kepada Ketua RW, kemudian kepada Ketua RT, dan terakhir kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di lapangan, daftar KPM diberikan kepada Kepala Desa/Kelurahan bersamaan dengan surat pemberitahuan dari Kantor Pos, seperti yang diakui oleh Informan 4. Seharusnya surat pemberitahuan kepada KPM diberikan paling lambat H-1, tetapi biasanya diberikan pada hari pengambilan. akibatnya, banyak KPM yang terlambat menerima dana BST. Pencairan Dana BST

### a. Melalui Kantor POS

Pengeluaran BST dilakukan di Kantor Pos. Selama pelaksanaannya, penerima BST dikumpulkan di cabang Kantor Pos kecamatan. Semua kelurahan, termasuk Tamamaung, menggunakan Kantor Pos Kecamatan Panakkukang, yang berlokasi di Jl. AP Pettarani. Selain itu, Kantor Pos harus menyiapkan tenda, kursi, dan alat pengeras suara serta memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, terutama KPM yang sakit, ibu hamil, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.

Pengeluaran BST dilakukan di Kantor Pos. Selama pelaksanaannya, penerima BST dikumpulkan di cabang Kantor Pos kecamatan. Semua kelurahan, termasuk Tamamaung, menggunakan Kantor Pos Kecamatan Panakkukang, yang berlokasi di Jl. AP Pettarani. Selain itu, Kantor Pos harus menyiapkan tenda, kursi, dan alat pengeras suara serta memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, terutama KPM yang sakit, ibu hamil, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.

### b. Melalui Transfer Bank BRI

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan bantuan sosial, melaksanakan prinsip 4T—Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi—serta mendorong inklusi keuangan. Presiden Republik Indonesia merekomendasikan agar bantuan sosial dan subsidi diberikan secara non tunai. Penggunaan sistem perbankan untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, sehingga lebih mudah untuk mengawasi, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Menurut informasi yang diberikan oleh TSK Kelurahan Tamamaung sejak pencairan bulan januari, KPM yang menerima melalui bank BRI sudah tidak menerima lagi untuk tahun 2021. Dinas sosial belum mengetahui alasan ketidakcairan TSK.

TKS Kelurahan Tamamaung mengungkapkan bahwa program BST tidak tepat sasaran atau tidak mencapai sasarannya, dan bahwa bantuan tersebut belum mencapai semua masyarakat yang rentan. Hanya 40% masyarakat miskin termasuk dalam basis data bantuan sosial (bdt.tnp2k.go.id). Ini menunjukkan bahwa data masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 tidak mencakup pekerja informal, pekerja yang di PHK, dan bisnis kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah pusat harus merespon laporan petugas lapangan dan daerah dengan cepat dan tepat, selain mengintegrasikan dan mensinkronkan data. Ketika kesadaran muncul, mereka mengembalikan bantuan sosial karena mereka merasa mampu berdiri sendiri dan meninggalkan program tersebut dengan alasan bahwa orang lain lebih berhak atas bantuan tersebut. Ini pasti dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif antara masyarakat penerima bantuan dan para pendamping program.

### **Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui BST**

Hasil penelitian di lapangan, implementasi program BST di Kelurahan Tamamaung memberikan gambaran yang menarik tentang upaya pemberdayaan kelompok miskin dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi selama masa pandemi Covid-19. Data menunjukkan bahwa dana BST yang diterima oleh keluarga miskin tidak hanya langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa temuan yang menarik. *Pertama*, meskipun BST memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan, sebagian besar penerima merasa bahwa jumlah dana yang diterima masih kurang untuk mencukupi semua kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh program BST cukup untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang.

*Kedua*, pemanfaatan dana BST oleh masyarakat menunjukkan adanya variasi dalam penggunaan dana tersebut. Sebagian besar dana digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti makanan, sandang, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun, terdapat juga sebagian kecil dari dana BST yang digunakan untuk modal usaha, pembelian perlengkapan sekolah, atau bahkan pembelian data internet. Hal ini menunjukkan bahwa BST tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. *Ketiga*, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana program BST mampu mengurangi kerentanan dan ketidakberdayaan yang menjadi faktor utama dalam jeratan kemiskinan.

Konsep "sarang kemiskinan" atau "jeratan kekurangan" Robert Chambers menjadi sebuah paradigma penting yang memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang menjebak individu atau kelompok dalam kemiskinan. Chambers mengidentifikasi lima faktor utama yang menjadi jeratan bagi individu miskin, yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

Dari kelima faktor tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan memegang peran sentral dalam

mempertahankan kelompok miskin dalam lingkaran kemiskinan. Kerentanan mencerminkan ketidakmampuan keluarga miskin untuk menghadapi situasi darurat atau krisis yang tidak terduga, seperti pandemi Covid-19, kenaikan harga bahan bakar minyak, atau bencana alam. Sebagai contoh, pandemi Covid-19 secara dramatis meningkatkan kerentanan kelompok miskin dengan menimbulkan tantangan ekonomi yang besar, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau terdampak langsung oleh pembatasan sosial dan *lockdown*.

Di sisi lain, ketidakberdayaan mengacu pada keterbatasan individu atau keluarga miskin dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dalam konteks program BST, evaluasi kritis terhadap sejauh mana program ini mampu mengurangi ketidakberdayaan menjadi sangat penting. Program BST diharapkan dapat memberikan akses langsung kepada dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperbaiki kondisi kesejahteraan, dan meningkatkan daya beli keluarga miskin.

Dari perspektif teori Chambers, implementasi program BST juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menghentikan "roda penggerak kemiskinan" atau "roket kemiskinan" yang seringkali memaksa keluarga miskin untuk semakin terjatuh dalam lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin, program BST diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi yang memaksa mereka menjual harta benda berharga atau terperangkap dalam utang yang menghambat kemajuan ekonomi mereka.

Dalam konteks teori Chambers, evaluasi program BST harus melibatkan penilaian mendalam tentang dampaknya terhadap faktor-faktor ini. Meskipun BST memberikan akses langsung kepada dana, masih perlu dipastikan bahwa program ini juga mampu mengatasi akar penyebab kemiskinan dan memberikan landasan yang kuat bagi kelompok miskin untuk bangkit dari jeratan kemiskinan. Oleh karena itu, hasil penelitian lapangan ini menyoroti pentingnya untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi program BST, serta untuk menyusun strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan kelompok miskin. Dengan demikian, diharapkan bahwa program BST tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membantu dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kelurahan Tamamaung dan wilayah sekitarnya.

## **SIMPULAN**

Program BST yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 telah memberikan bantuan yang signifikan kepada kelompok miskin di Kelurahan Tamamaung. Meskipun bantuan tersebut membantu, sebagian besar penerima merasa jumlahnya masih kurang. Penggunaan dana BST bervariasi, dari kebutuhan konsumsi hingga modal usaha. Namun, masih ada tantangan dalam verifikasi data dan pencairan dana. Meskipun demikian, BST berpotensi mengurangi kerentanan dan ketidakberdayaan yang menjadi akar kemiskinan, tetapi

diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Dari perspektif teori Chambers, implementasi program BST dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan dan ketidakberdayaan yang menjadi faktor utama dalam jeratan kemiskinan. Meskipun program ini memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberdayaan kelompok miskin, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti masalah verifikasi data dan pencairan dana yang tidak tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa program ini efektif dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan dan memberikan landasan yang kuat bagi kelompok miskin untuk bangkit dari jeratan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Agus Salim. (2002). *Perubahan sosial*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogyakarta.
- BPS Makassar. (2020). *Data Kemiskinan BPS Kota Makassar*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar. <https://makassarkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>
- Bessant, Judith; Watts, Rob; Dalton, Tony; Smith, Paul. (2006). *Talking Policy: How social Policy in Made*. Crows Nest: Allen and Unwin.
- Cheyne, Christine, Mike O'Brien and Michael Belgrave. (1998). *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Auckland, Oxford University Press.
- Conyers, Diana, (1992). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar. Terjemahan Susetiawan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Ditjen P2P. (2021, December 23). *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>
- Fadli, Rizal. (2020). *Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*. melalui: <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>.
- Huttman, Elizabeth Dickerson. (1982). *Introduction to Social Policy*. New York: McGraw-Hill.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Izzati Al, Ridho. (2020). *Estimasi Dampak Pandemi COVID-19 pada Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Kemenkeu. (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Marshall, T.H. (1981). *The Right to Welfare*. London: Heinemann.
- Mustofa, Bisri dan Maharani, Eilsa. (2010). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Nur, A., Iqbal Latief, M., & Haris, A. (2021). BST sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kelompok Miskin pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)*, 3(2), 118–125.
- Rein, Martin. (1983). *From Policy to Practice*. London: Macmillan.
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedjatmoko. (1980). *Kesadaran Sejarah dan Pembangunan*. Jakarta: Arsip Nasional.
- Suharto Edi. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto Edi. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryahadi, Asep et al. (2020). *The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. SMERU. Working Paper. *The SMERU Research Institute*: Jakarta.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing.
- Simbolon, T. R., Sinaga, E. E., Raysharie, P. I., Hukom, A., & Takari, D. (2023). *Pengentasan Kemiskinan*

Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(2).  
TNP2K. (2021). Buletin TNP2K. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)*, 2(1).  
World Health Organization (2020). *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*. Diakses melalui:  
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.